



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020-2023

	:	119/66/Pemksm
	:	119/30/KB/KS/IX/2019
	:	119/KK.57-Bag.Adekon dan KS
	:	050/23/KB/Pem/Huk/2019
	:	120.23/14-KB/IX/2019
	:	20/MoU/EkBang&KD/2019
	:	134.4/MoU_31/BagPem/2019
	:	20/KB.134.4/AKS/IX/2019
	:	
	:	073/5993/KSM
	:	180/16/Pemotda/2019
	:	PT.02.01/KB.50-Humaspro/2019
	:	130.4/NK.31/Pem/2019
NOMOR	:	120.23/KB.22-ASS.EKBANG/2019
	:	130/32/Tapem/2019
	:	
	:	120.23/KBS.20-Protokoler/2019
	:	120.23/033-KSOTDA/2019
	:	119/3437-Bag.ks
	:	130.3/430-NK/2019
	:	134.4/MoU.53/Bag.Tapem/2019
	:	120.23/KB.88-KS/2019
	:	120.23/2718/tapem
	:	130.3/34/Pem/IX/2019
	:	120.23/MoU.24-Pem/2019
	:	119/20-Pem.3/2019
	:	073/Kjs.27-Huk/2019
	:	181/40-Huk/2019

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu sembilan belas (.....-.....-2019), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ADE YASIN : Bupati Bogor, berkedudukan di Cibinong, Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- BIMA ARYA SUGIARTO : Wali Kota Bogor, berkedudukan di Bogor, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bogor.
- MOHAMMAD IDRIS : Wali Kota Depok, berkedudukan di Depok, Jalan Margonda Raya Nomor 54, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Depok.
- MARWAN HAMAMI : Bupati Sukabumi, berkedudukan di Pelabuhanratu, Jalan Siliwangi Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
- ACHMAD FAHMI : Wali Kota Sukabumi, berkedudukan di Sukabumi, Jalan R. Syamsudin, SH Nomor 25, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
- HERMAN SUHERMAN : Plt. Bupati Cianjur, berkedudukan di Cianjur, Jalan Siti Jenab Nomor 31, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
- EKA SUPRIA ATMAJA : Bupati Bekasi, berkedudukan di Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- RAHMAT EFFENDI : Wali Kota Bekasi, berkedudukan di Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- CELLICA NURRACHADIANA : Bupati Karawang, berkedudukan di Karawang, Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

ANNE RATNA MUSTIKA	: Bupati Purwakarta, berkedudukan di Purwakarta, Jalan Gandanegara Nomor 25, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
RUHIMAT	: Bupati Subang, berkedudukan di Subang, Jalan Dewi Sartika Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
IMRON	: Plt. Bupati Cirebon, berkedudukan di Sumber, Komplek Perkantoran Sumber Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
NASHRUDIN AZIS	: Wali Kota Cirebon, berkedudukan di Cirebon, Jalan Siliwangi Nomor 84, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
SUPENDI	: Bupati Indramayu, berkedudukan di Indramayu, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1 E, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
ACEP PURNAMA	: Bupati Kuningan, berkedudukan di Kuningan, Jalan Siliwangi Nomor 88, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
KARNA SOBAHI	: Bupati Majalengka, berkedudukan di Majalengka, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
DADANG M. NASER	: Bupati Bandung, berkedudukan di Soreang, Jalan Raya Soreang KM 17, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
ODED MOHAMAD DANIAL	: Wali Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung.
AJAY MUHAMMAD PRIATNA	: Wali Kota Cimahi, berkedudukan di Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Blok Jati, Cihanjuang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

- AA UMBARA SUTISNA : Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Ngamprah, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- DONY AHMAD MUNIR : Bupati Sumedang, berkedudukan di Sumedang, Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- RUDY GUNAWAN : Bupati Garut, berkedudukan di Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- BUDI BUDIMAN : Wali Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
- HERDIAT SUNARYA : Bupati Ciamis, berkedudukan di Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
- ADE UU SUKAESIH : Wali Kota Banjar, berkedudukan di Banjar, Jalan Siliwangi Nomor 49, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Banjar.
- JEJE WIRADINATA : Bupati Pangandaran, berkedudukan di Parigi, Jalan Raya Alun Alun Parigi Nomor 2 Kecamatan Parigi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Para Bupati dan Wali Kota tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 364 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.
2. Kerja Sama antara daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) merupakan upaya untuk mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah (Kabupaten/Kota) baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk dimanfaatkan bersama secara timbal balik yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas.
3. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur dan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. PARA PIHAK berkomitmen untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan jejaring kerja sama pembangunan Daerah yang sinergis, terencana dan terintegrasi yang pada pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing Daerah guna meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yang berkeadilan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yaitu :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.

- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
 - 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pariwisata;
 - 3. pertanian;
 - 4. kehutanan;
 - 5. energi dan sumber daya mineral;
 - 6. perdagangan;
 - 7. perindustrian; dan
 - 8. transmigrasi.
- d. Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah, meliputi :
 - 1. pendapatan Daerah;
 - 2. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - 3. pengawasan dan pembinaan;
 - 4. perencanaan;
 - 5. keuangan; dan
 - 6. penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kerja Sama Pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan melalui sinergitas Program dan Kegiatan yang dikoordinasikan dan disusun oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Rencana Kerja Program/Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023, yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (2) PARA PIHAK baik secara bersama-sama atau masing-masing bersepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan melakukan koordinasi melalui Unit Kerja yang ditunjuk di lingkungan masing-masing PIHAK, sesuai dengan Rencana Kerja Program/Kegiatan Kerja Sama Pembangunan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.
- (3) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan operasional.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT :

Tujuan : Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung
Telepon : (022) 4232448
Faksimili : (022) 430485
Email : kerjasama.dn@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor
Alamat : Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Cibinong
Telepon : (021) 876 3647
Faksimili : (021) 875 4528 - 875 4529
Email : kerjasamasetda@yahoo.com/ umumsetda@bogorkab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR :

Tujuan : Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bogor
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Bogor
Telepon : (0251) 832 1075
Faksimili : (0251) 832 6530
Email : kerjasama_kotabogor@yahoo.co.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK :

Tujuan : Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Depok
Alamat : Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok
Telepon : (021) 777 3610
Faksimili : (021) 7720 4217
Email : subagian.kerjasama@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI :

Tujuan : Bagian Kerja Sama dan Pengembangan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu
Telepon : (0266) 433 611
Faksimili : (0266) 433 614
Email : tkksd@sukabumikab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI :

Tujuan : Bagian Perekonomian Pembangunan dan Kerja Sama Daerah
Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Alamat : Jalan R. Syamsudin, S.H Nomor 25 Kota Sukabumi
Telepon : (0266) 221 123 – 221 125
Faksimili : (0266) 221 125 ext. 150
Email : ekbangkd.sukabumikota@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur
Alamat : Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur
Telepon : (0263) 261 892
Faksimili : (0263) 263 686
Email : pemerintahan-setda@cianjurkab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI :

Tujuan : Bagian Administrasi Kerja Sama Kabupaten Bekasi
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi,
Cikarang Pusat
Telepon : (021) 8997 0065
Faksimili : (021) 8997 0067
Email : bag_kerjasama@bekasikab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Bekasi Nomor 1 Bekasi
Telepon : (021) 8896 1767
Faksimili : (021) 8895 9980
Email : bagiankerjasamakotabekasi@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Karawang
Alamat : Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Karawang
Telepon : (0267) 429 800 - 429 801 - 429 803
Faksimili : (0267) 411 923
Email : kerjasamapemkabkarawang@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA :

Tujuan : Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Kabupaten Purwakarta
Alamat : Jalan Gandanegara Nomor 25 Purwakarta
Telepon : (0264) 200 036
Faksimili : (0264) 200 037
Email : pem.otda@purwakartakab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG :

Tujuan : Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Subang
Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang
Telepon : (0260) 411 005
Faksimili : (0260) 411 003
Email : kerjasamahumassubang@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon
Alamat : Komplek Perkantoran Sumber Cirebon
Telepon : (0231) 321197, 321792
Faksimili : (0231) 321025, 321231
Email : pemerintahansetdacrbbkab@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON :

Tujuan : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah Kota Cirebon
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 84 Cirebon
Telepon : (0231) 206 011
Faksimili : (0231) 202 344
Email : bagianadmpemumkotacirebon@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU :

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Indramayu
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1 E Indramayu
Telepon : (023) 272 205, 272 327
Faksimili : (023) 272797
Email : bagtapemimy@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN :

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kuningan
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 88 Kuningan
Telepon : (0232) 871045
Faksimili : (0232) 871068
Email : tapemKNG@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA :

Tujuan : Bagian Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Majalengka
Telepon : (0233) 281 206
Faksimili : (0233) 281 475
Email : humassetda1@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG :

Tujuan : Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Bandung
Alamat : Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang
Telepon : (022) 589 1119
Faksimili : (022) 589 1119, 5891183
Email : Bag.kerjasama.otda@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung
Alamat : Jalan Aceh Nomor 51 Bandung
Telepon : (022) 421 4656
Faksimili : (022) 421 4656
Email : bag.ksd.bdg@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi
Alamat : Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Blok Jati,
Cihanjuang, Cimahi
Telepon : (022) 665 4274
Faksimili : (022) 665 4274
Email : bag.pem.cimahi@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT :

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bandung Barat
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 2
Ngamprah
Telepon : (022) 82783481
Faksimili : (022) 82783481
Email : kerjasama_bandungbarat@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang
Alamat : Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang
Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang
Telepon : (0261) 202 001, 201 606
Faksimili : (0261) 202 001
Email : setda.smd.bag.kerjasama@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT :

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Garut
Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut
Telepon : (0262) 232 225
Faksimili : (0262) 231 118
Email : subaghubalemtapem@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna
Telepon : (0265) 543000
Faksimili : (0265) 543123
Email : bag.pemerintahan@tasikmalayakab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Alamat : Jalan Letnan Harun Nomor 1 Tasikmalaya
Telepon : (0265) 322 865
Faksimili : (0265) 330 805
Email : bagpemkd@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis
Alamat : Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis
Telepon : (0256) 771511
Faksimili : (0265) 772776
Email : kerjasamapemdaciamis@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 49 Banjar
Telepon : (0265) 744 800
Faksimili : (0265) 747 131
Email : tapemkotabanjar@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran
Alamat : Jalan Raya Alun Alun Parigi Nomor 2 Kecamatan Parigi Pangandaran
Telepon : (0265) 2641 721
Faksimili : (0265) 2641 721
Email : pemerintahan.setdapnd@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 30 (tiga puluh), 29 (dua puluh sembilan) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK,

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR,

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

MOHAMMAD IDRIS

BIMA ARYA SUGIARTO

ADE YASIN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI,

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,



HERMAN SUHERMAN



ACHMAD FAHMI



MARWAN HAMAMI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BEKASI, 

RAHMAT EFFENDI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI, 

EKA SUPRIA ATMAJA

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



IMRON

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG, 

RUHIMAT

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA, 

ANNE RATNA MUSTIKA

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,

PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON,

ACEP PURNAMA 

SUPENDI 

NASHRUDIN AZIS 

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG,

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


ODED MOHAMAD DANIAL

DADANG M. NASER 


KARNA SOBAHI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG, 

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI,

DONY AHMAD MUNIR 

AA UMBARA SUTISNA

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,

BUDI BUDIMAN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GARUT,

RUDY GUNAWAN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

JEJE WIRADINATA

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,

HERDIAT SUNARYA

LAMPIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

TANGGAL : 26 September 2019

TENTANG : KERJA SAMA PEMBANGUNAN
DI WILAYAH PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2020 – 2023.

PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
PELAYANAN DASAR										
1	Pendidikan	1. Belum meratanya akses pendidikan; 2. Belum optimalnya mutu pendidikan; 3. Belum optimalnya tata kelola pendidikan; dan 4. Belum <i>link and match</i> lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha.	1. Pembangunan sarana prasarna Infrastruktur Pendidikan; 2. Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 3. Peningkatan Mutu Pendidikan.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan.	√	√	√	√	√	√
2	Kesehatan	1. Jumlah kematian ibu dan bayi masih banyak; 2. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular; 3. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat;	1. Pelayanan Kesehaan Masyarakat; 2. Pengendalian Penyakit Menular; 3. Penignkatan Sumber Daya Kesehatan; dan 4. Penanganan Kesehatan akibat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan.	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
		4. Masalah gizi masyarakat; 5. Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan; dan 6. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata.	Bencana/KLB.							
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	1. Pelaksanaan pemanfaatan ruang (pembangunan) yang tidak sesuai dengan RTRW; dan Provinsi Jawa Barat; dan 2. lamanya proses pembangunan infrastruktur sumber daya air lainnya.	1. Penataan Ruang; 2. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Situ, Sungai, Pantai, dan Sumber Daya Air lainnya; dan 3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Tambak dan Jaringan Pengairan lainnya.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang serta Meningkatkan pengelolaan DAS, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.	√	√	√	√	√	√
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Keterbatasan dan mahalannya harga lahan, pembangunan rumah bagi MBR yang sesuai dengan batas harga pemerintah.	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.	√	√	√	√	√	√
5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan	Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi masih dimaknai sebagai	1. Meningkatkan ketangguhan terhadap bencana; 2. Pengurangan	Terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
	masyarakat	kebebasan semata oleh sebagian masyarakat yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.	3. Kerentanan Bencana; dan Peningkatan ketentraman dan ketertiban cukup baik.	masyarakat.						
6	Sosial	1. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran; 2. Belum optimalnya penanganan bencana sosial; 3. Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan <i>human trafficking</i> ; 4. Belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial	1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial; 2. Perlindungan dan Jaminan Sosial; 3. Pemberdayaan Sosial; dan 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan bidang Peningkatan Pelayanan Sosial.	Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan serta Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin.	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
		<p>pemberdayaan sosial, penanganan</p> <p>5. Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial;</p> <p>6. Masih rentan terhadap konflik sosial; dan</p> <p>7. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).</p>								
NON PELAYANAN DASAR										
1	Tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang rendah sebesar dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tinggi.	<p>1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan</p> <p>2. Peningkatan Kesempatan Kerja.</p>	Menurunnya Tingkat Pengangguran.	√	√	√	√	√	√
2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<p>1. Masih banyaknya jumlah perdagangan perempuan dan anak di Jawa Barat; dan</p> <p>2. Masih banyaknya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak lintas daerah Kabupaten/Kota.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
3	Pangan	1. Intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi; dan 2. Ketersediaan pangan di Jawa Barat masih mengalami ketimpangan.	1. Ketahanan Pangan; 2. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan 3. Peningkatan Produksi Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Peternakan.	Terwujudnya Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri dalam rangka mencapai kedaulatan pangan di Jawa Barat.	√	√	√	√	√	√
4	Pertanahan	Luas lahan bersertifikat di Jawa Barat tidak banyak menunjukkan peningkatan sehingga masih menjadi permasalahan yang membutuhkan penanganan lebih baik.	1. Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; dan 2. Sertifikasi Tanah	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Pemegang hak atas suatu bidang tanah.	√	√	√	√	√	√
5	Lingkungan hidup	terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat.	√	√	√	√	√	√
6	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM.	Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Terwujudnya penataan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jawa Barat.	√	√	√	√	√	√
7	Pemberdayaan masyarakat dan	Belum sinergisnya program/kegiatan	1. peningkatan dan pembinaan peran	Meningkatnya pembangunan dan	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
	Desa.	pembangunan daerah berlokasi desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota.	serta masyarakat dalam pembangunan; dan 2. Pemantapan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa.	pemberdayaan masyarakat desa.						
8	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	peningkatan jumlah Keluarga Pra Sejahtera menjadi Keluarga Sejahtera I tidak dibarengi dengan peningkatan dari Keluarga Sejahtera I ke Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus.	Pelayanan Keluarga Berencana.	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk.						
9	Perhubungan	belum optimalnya tingkat ketersediaan perlengkapan dan sarana dan prasarana	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 2. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; 3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; 4. Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum;	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat pusat perekonomian serta mempercepat Infrastruktur konektivitas wilayah.	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
			5. Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan; 6. Pengendalian dan Pengamanan Perhubungan; 7. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta antar kota (P); 8. Pengembangan transportasi massal perkotaan; dan 9. Pembangunan pelabuhan dan transportasi sungai (P).							
10	Komunikasi dan informatika	1. Penerapan e-Governmnet sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 belum ditindaklanjuti dengan; dan kebijakan/aturan hukum daerah 2. Belum ada regulasi terbaru seiring dengan perkembangan	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Terwujudnya inovasi tata pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih.	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
		teknologi informasi tentang pengembangan kelompok informasi masyarakat, pembinaan komunitas komunikasi dan informatika serta pembinaan media tradisional.								
11	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	1. Terbatasnya Akses pembiayaan bagi KUKM; 2. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal; dan 3. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.	1. Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan 2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Menurunnya Tingkat Pengangguran dan Lapangan Kerja.	√	√	√	√	√	√
12	Penanaman modal	1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata;	1. Pembangunan Investasi Daerah; dan 2. Peningkatan Investasi Daerah Peningkatan Pelayanan Terpadu	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
		2. Belum sesuai nya kualifikasi angkatan kerja lokal dengan pasar; dan tenaga kerja; dan 3. Dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha.	Satu Pintu.							
13	Kepemudaan dan olah raga	1. Rendahnya partisipasi pemuda Jawa Barat dalam lapangan dan kesempatan kerja; 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Jawa Barat yang melakukan kegiatan olahraga; dan 3. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan	1. Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan; dan 2. Pembinaan, Pemasarakatan dan Pengembangan Olah Raga.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
14	Statistik	Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh bidang statistik	1. pemanfaatan data dan informasi statistik; dan 2. pembinaan dalam pengelolaan data dan informasi statistik 3. pengembangan sistem informasi statistik.		√	√	√	√	√	√
15	Persandian	1. Masih rendahnya kesadaran aparaturnya maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi; 2. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas; dan 3. SDM Pengelola yang terbatas	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah		√	√	√	√	√	√
16	Kebudayaan	1. Masih rendahnya perlindungan terhadap budaya lokal Jawa Barat;	Pengembangan Nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
		2. Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal Jawa Barat; 3. Kurang optimalnya promosi budaya lokal Jawa Barat di dalam dan luar negeri. 4. Kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya Jawa Barat.								
17	Perpustakaan	1. Masih rendahnya minat baca masyarakat; 2. Kurang Sarana dan Prasarana; dan 3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan sebagai tempat berkegiatan.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya masyarakat Jabar gemar membaca	√	√	√	√	√	√
18	Kearsipan	1. Akses penggunaan arsip belum efektif. 2. Penelusuran dan identifikasi arsip kesejarahan belum efektif.	Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan		√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
PILIHAN										
1	Kelautan dan perikanan	1. Terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap; 2. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan zonasi wilayah pesisir; dan 3. Ratarata konsumsi ikan masyarakat di Jawa Barat masih relatif rendah jika dibandingkan dengan standar <i>World Health Organization</i> (WHO)	1. Peningkatan Produksi Perikanan Dan Daya Saing Produk Perikanan; dan 2. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri dalam rangka mencapai kedaulatan pangan di Jawa Barat.	√	√	√	√	√	√
2	Pertanian	1. Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian dan nilai tambah petani; 2. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir; 3. Terganggunya ekosistem pangan, pertanian dan perikanan;	Peningkatan Produksi Produktifitas dan Nilai Tambah Pertanian dan Perkebunan.	Terwujudnya Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri dalam rangka mencapai kedaulatan pangan di Jawa Barat.	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
		4. Menurunnya luas lahan pertanian; 5. Ketersediaan data pertanian belum memadai; 6. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya; 7. Pertanian; 8. Tingginya gangguan hama dan penyakit ; 9. tanaman pertanian dan 10. perkebunan, serta peternakan; dan 11. Rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian.								
3	Pariwisata	1. Belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif; dan 2. Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan	1. Pengembangan destinasi wisata dan infrastruktur wisata; dan 2. Pengembangan pemasaran Pariwisata.	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif.	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
		performa yang sesuai dengan potensinya.								
4	Kehutanan	1. Rendahnya produktivitas hasil hutan. 2. Jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan masih tinggi. 3. Tumpang tindih kewenangan dalam hal pembentukan perhutanan sosial.	1. Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; 2. Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 3. Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat.		√	√	√	√	√	√
5	Energi dan sumber mineral	1. Masih ditemukan aktivitas pertambangan yang tidak mengikuti kaidah usaha pertambangan yang baik (<i>good mining practice</i>) Meningkatkan penggunaan air tanaga; 2. Instalasi tenaga listrik belum terstandarisasi; 3. Belum meratanya akses terhadap layanan listrik; dan	1. Pengembangan Energi; dan 2. Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Geologi	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
		4. Pemanfaatan energi final belum efisien dan minimnya pemanfaatan baru dan terbarukan.								
6	Perdagangan	1. Promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang; 2. Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern; dan 3. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar tradisional belum memadai. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Ekspor	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat.	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
7	Perindustrian	1. Infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri; 2. Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri; dan 3. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.	Pembangunan Industri	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	√	√	√	√	√	√
8	Transmigrasi	Kompetensi transmigran Jawa Barat yang kalah bersaing dengan daerah lain.	1. Kompetensi transmigran Jawa Barat; dan 2. Penguatan sistem dan pengelolaan transmigrasi.	Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi transmigran Jawa Barat.	√	√	√	√	√	√
PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN										
1	Pendapatan Daerah	1. Belum optimalnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.	Pengelolaan Pendapatan Daerah, meliputi : 1. Intensifikasi Pajak;	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> dan bersih.	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
		2. Kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak	2. Peningkatan Pelayanan Pembayaran Pajak; dan 3. Pembaharuan data Pajak.							
2	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	1. Reformasi birokrasi belum terealisasi secara optimal; 2. Belum adanya perencanaan manajemen kepegawaian	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> dan bersih.	√	√	√	√	√	√
3	Pengawasan dan pembinaan	Belum Optimalnya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> dan bersih.	√	√	√	√	√	√
4	Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya konsistensi perencanaan Daerah	1. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan 2. Kesesuaian Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> dan bersih.	√	√	√	√	√	√
5	Kuangan	Rendahnya Kapasitas fiskal kabupaten/kota masih banyak yang dibawah 15 persen dari APBD-nya	Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> dan bersih.	√	√	√	√	√	√

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN			2020	2021	2022	2023	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
6	penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan	Masih rendahnya pemanfaatan hasil penelilitain dan inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan dan Penerapan IPTEK	Meningkatnya hasil Penelitian dan Inovasi Daerah yang dapat diterapkan dalam Pembangunan Jawa Barat	√	√	√	√	√	√

PIHAK KESATU,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

 MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PIHAK KEDUA,

PEMERINTAH DAERAH KOTA
DEPOK,

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR,

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

MOHAMMAD IDRIS

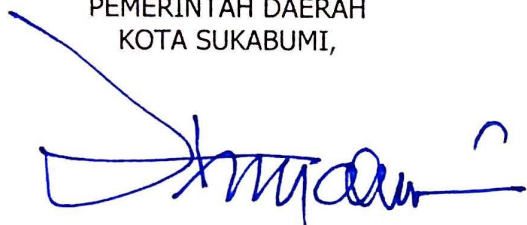
BIMA ARYA SUGIARTO

ADE YASIN



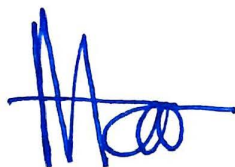
HERMAN SUHERMAN

PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI,



ACHMAD FAHMI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI,

EKA SUPRIA ATMAJA

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

IMRON

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

RUHIMAT

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,



SUPENDI

PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON,

NASHRUDIN AZIS

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG,

ODED MOHAMAD DANIAL

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

DADANG M. NASER

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR


PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,


AA UMBARA SUTISNA

PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI,

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,


BUDI BUDIMAN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GARUT,


RUDY GUNAWAN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN


JEJE WIRADINATA

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,


HERDIAT SUNARYA